

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jepang merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia Timur dengan sektor industri dan teknologinya yang berkualitas. Mengunggulkan sektor industri menjadi pilihan bagi Jepang karena sejatinya Jepang termasuk negara yang memiliki Sumber Daya Alam rendah. Meskipun demikian tidak menjadikan Jepang gagal untuk menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi bagus serta negara yang besar.¹ Sekalipun menjadi negara yang besar, Jepang memiliki permasalahan terkait dengan tenaga kerja.² Permasalahan yang tengah dialami Jepang tersebut berakar dari *Aging Population*³ yaitu krisis usia produktif yang menyebabkan banyak pekerja lokal Jepang yang memasuki usia non-produktif, sehingga berdampak pada terancamnya Jepang kekurangan tenaga kerja produktif.⁴ Tingginya jumlah populasi non-produktif dikarenakan minimnya angka kelahiran bayi di Jepang yang kian menurun. Angka kelahiran bayi pada tahun 2013 tercatat mengalami penurunan hingga hampir mencapai 6.000 kelahiran, dengan kematian

¹ *Mengenal Sistem Ekonomi Jepang, Salah Satu Negara Industri Paling Maju di Dunia*, diakses melalui <https://www.onlenpedia.com/2016/12/mengenal-sistem-ekonomi-jepang-salah.html> (03/07/2019, 00:57 WIB)

² *Jepang Buka Pintu Lebar Lebar Untuk Pekerja Asing*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181102110353-532-343431/jepang-buka-pintu-lebar-lebar-untuk-pekerja-asing> (03/07/2019, 08:40 WIB)

³ Menurut United Nation, *Aging Population* (penuaan penduduk) adalah fenomena peningkatan jumlah median penduduk di suatu wilayah yang mana disebabkan oleh meningkat maupun menurunnya tingkat fertilitas (kesuburan), dalam Heryanah, *Ageing Population dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia*, *Jurnal Populasi*, Vol, 23, No, 2 (2015), Sukabumi: Badan Pusat Statistik, hal. 3, diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/populasi/article/download/15692/10457> (03/07/2019, 12:15 WIB)

⁴ *Ibid.*

naik sebesar 19.000 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah di tahun 2012.⁵ Bahkan disebutkan bahwa kelahiran bayi tahun 2014 menurun sekitar 9.000 kelahiran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.⁶

Tingginya jumlah penduduk usia lanjut ini selain menciptakan banyak kekosongan di sektor lapangan pekerjaan, juga membuat semakin tingginya biaya kesejahteraan yang harus ditanggung pemerintah. Hal tersebut kemudian berimbas pada naiknya batas usia pensiun menjadi 70 tahun bagi karyawan, serta dari yang sebelumnya 60 tahun kemudian menjadi 65 tahun bagi pegawai negeri sipil.⁷ Melesatnya pertumbuhan penduduk usia lanjut dan pertumbuhan sektor industri berbanding terbalik dengan semakin berkurangnya angka usia produktif yang membuat banyak lapangan pekerjaan di Jepang kosong karena kurangnya pekerja.

Menurut survey tenaga kerja tahun 2015, menunjukkan sekitar 83% manager bidang perekrutan tenaga kerja Jepang menemui kesulitan mengisi kekosongan posisi pekerjaan.⁸ Bahkan, akibat dari *aging population* menciptakan perubahan perspektif para pemuda di Jepang untuk cenderung menghindari pekerjaan kelas bawah (*unskilled workers*)⁹ yang berdampak pada semakin berkurangnya tenaga kerja pada sektor tersebut.

⁵ *Rekor Penurunan Penduduk Jepang*, diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/01/140101_jepang_penduduk (26/10/2018, 23:30 WIB)

⁶ *Angka Kelahiran di Jepang Capai Titik Rendah*, diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/01/150102_majalah_jepang_kelahiran (26/10/2018, 09:46 WIB)

⁷ *Krisis Tenaga Kerja, Usia Pensiun di Jepang Jadi 70 Tahun*, diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/17/141806626/krisis-tenaga-kerja-usia-pensiun-di-jepang-jadi-70-tahun> (26/10/2018, 10:08 WIB)

⁸ *Kekurangan Tenaga Kerja, Jepang Bakal Rekrut Pekerja Asing*, diakses melalui <https://m.republika.co.id/amp/ofmxjs383> (26/10/2018, 10:18 WIB)

⁹ Istilah yang digunakan untuk pekerja yang masuk pada sektor-sektor dengan bayaran rendah, kerap kali disebut dengan istilah **3K** (*kitanai/kotor, kitsui/sulit, kiken/berbahaya*) seperti sektor

Sebagai negara yang memiliki begitu banyak sektor industri, Jepang sendiri mengkalsifikasikan para pekerjaanya ke dalam dua kelas. Klasifikasi tersebut yakni pekerja kelas bawah (*unskilled workers*) dan pekerja kelas atas atau pekerja terlatih (*skilled workers*). Pekerja kelas bawah (*unskilled workers*) adalah tenaga kerja tidak terampil atau tidak memiliki keahlian khusus. Para pekerja kelas bawah ini menduduki sektor-sektor yang kelas rendah antara lain seperti konstruksi, buruh, pegawai toko, dan petugas kebersihan. Sedangkan pekerja kelas atas (*skilled workers*) yakni tenaga kerja terampil yang memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu. Para pekerja kelas atas atau terampil ini menduduki bidang-bidang pekerjaan antara lain seperti pekerja di dalam pemerintahan, dokter, pengacara dan juga perawat atau tenaga kesehatan.¹⁰

Kurangnya tenaga kerja di hampir berbagai sektor pekerjaan, kemudian mendorong pemerintah Jepang untuk melakukan berbagai usaha guna menyikapi permasalahan yang tengah dialami tersebut. Beberapa upaya yang diupayakan Jepang dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja tersebut adalah melalui kebijakan dalam negeri antara lain pengkaryaan kembali, mereformasi pekerja dan *womanomics*. Namun tampaknya upaya tersebut masih belum mampu mengatasi permasalahan krisis tenaga kerja akibat adanya *aging population* tersebut.

Selain mengalami kekurangan tenaga kerja pada sektor pekerjaan kelas bawah seperti yang dijelaskan di atas, krisis tenaga kerja yang melanda Jepang

konstruksi atau bangunan, dalam Niki Wahyu Sayekti, *Kebijakan Terhadap Imigran: Analisis Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Ke-2*, Kebijakan Jepang Terhadap Tenaga Kerja Imigran diakses melalui <http://docplayer.info/46448057-Kebijakan-jepang-terhadap-imigran-analisis-pada-masa-pemerintahan-shinzo-abe-periode-ke-2.html> (10/06/2019, 12:30 WIB)

¹⁰ *Skilled Labor Vs. Unskilled Labor*, diakses melalui <https://smallbusiness.chron.com/skilled-labor-vs-unskilled-labor-46154.html> (20/06/2019, 22:20 WIB)

juga terjadi pada sektor kesehatan. Hal tersebut terbukti dengan adanya permintaan Jepang kepada Indonesia untuk mengirimkan kurang lebih 400-500 ribu tenaga kesehatan (*kaigofukushishi*) dan perawat (*kangoshi*).¹¹ Semakin banyaknya kebutuhan akan tenaga kesehatan atau perawat dikarenakan semakin banyak penduduk Jepang yang memasuki usia lanjut yang berimbas pada naiknya kebutuhan akan tenaga kesehatan atau perawat terutama bagi lansia.¹²

Untuk itu, guna menyiasati kekurangan tenaga kerja khususnya tenaga kesehatan dan perawat tersebut, pemerintah Jepang membentuk kebijakan mengenai kerjasama *Economic Partnership Agreement* (EPA)¹³, yang salah satu poinnya adalah pengiriman tenaga kesehatan dan perawat untuk masuk ke Jepang. Dalam kerjasama tersebut Jepang menjalin kerjasama dengan *Indonesia* (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*), dimana Indonesia menjadi negara pemasok tenaga kesehatan dan perawat untuk dikirim ke Jepang.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian **Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Menangani Krisis Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Indonesia dan Filipina** ini diambil oleh penulis karena kecenderungan Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja disektor selain sektor kelas bawah, yakni

¹¹ *Jepang Butuh Ratusan Ribu Tenaga Kesehatan Indonesia*, diakses melalui <https://m.republika.co.id/berita/nasional/sang-pencerah/19/02/12pmt2b1423-jepang-butuh-ratusan-ribu-tenaga-kesehatan-indonesia> (20/06/2019, 20:28 WIB)

¹² *Jepang Butuh 450 Ribu Perawat Untuk Lansia; Siakah Kita?*, diakses melalui <https://www.wawasan.co/news/detail/8027/jepang-butuh-450-ribu-perawat-untuk-lansia-siakah-kita> (20/06/2019, 22:19 WIB)

¹³ Kerjasama ekonomi bilateral yang didirikan Jepang di tahun 2000an. Negara-negara yang telah melakukan EPA dengan Jepang antara lain yakni Mexico, Chili, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, termasuk pula Indonesia, dalam Bab III, *Objek Penelitian*, 3.1 *Economic Partnership Agreement* (EPA), diakses melalui https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://elib.unikom.ac.id/download.php%3Fid%3D57867&ved=2ahUKEwi61ouDj_jiAhXJV30KHZZnBhgQFjABegQIARAB&usq=A0vVaw2nDD2iyxq3YIbMXXCt-yVV (20/06/2019, 20:15 WIB)

sektor kesehatan. Penulis memfokuskan kepada sektor kesehatan karena saat ini sektor kesehatan merupakan salah satu dari beberapa sektor penting yang merasakan dampak dari *aging population*. Hal tersebut berimbas jauhnya gap atau selisih antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kesehatan bagi masyarakat Jepang di tahun-tahun lalu, salah satunya tahun 2004.¹⁴ Selain itu juga melihat adanya upaya yang dilakukan pemerintah Jepang guna menarik lebih banyak tenaga kesehatan salah satunya dengan meningkatkan intensitas kerjasama bilateral melalui EPA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas maka penulis merumuskan sebuah pertanyaan yakni, ‘Bagaimana Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Menangani Krisis Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Indonesia dan Filipina ?’

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian kali ini yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama Jepang dengan Indonesia dalam menangani krisis tenaga kerja di bidang kesehatan melalui kerangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) serta Jepang dengan Filipina dalam *Philippines-Japan Economic Partnership Agreement* (PJEPA).

¹⁴ Fitri Rizka Fairuz, *Kebijakan Pemerintah Jepang Menerima Tenaga Kerja Filipina di Bidang Kesehatan Dalam Japan-Philippines Economic Partnership Agreement*, diakses melalui <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2802/KEBIJAKAN%20PEMERINTAH%20JEPANG%20MENERIMA%20TENAGA%20KERJA%20FILIPINA%20DI%20BIDANG%20KESEHATAN%20DALAM%20JAPAN-PHILIP.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (10/09/2019, 21:27 WIB)

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Jepang dengan Indonesia melalui kerangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), sekaligus kerjasama Jepang dengan Filipina melalui *Philippines-Japan Economic Partnership Agreement* (PJEPA) sebagai solusi untuk menangani krisis tenaga kerja di Jepang dalam bidang kesehatan.

1.3.2.2 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat memperkaya literatur mengenai kebijakan pemerintah Jepang pada masa Shinzo Abe terkait tenaga kesehatan atau perawat di ranah Studi Hubungan Internasional.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam tulisan ini penulis memasukkan beberapa jurnal sebagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan penulisan. Penelitian *pertama* berjudul **“Analisis Implementasi Kebijakan Abenomics di Jepang Tahun 2012-2017”** oleh Adi Abas.¹⁵ Pembahasan yang terdapat dalam penelitian tersebut menitikberatkan pada bagaimana Shinzo Abe selaku perdana menteri untuk

¹⁵ Adi Abas, *Analisis Implementasi Kebijakan Abenomics di Jepang Tahun 2012-2017*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol, 6, No, 2 (2018), Samarinda: Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, hal. 443-458, diakses melalui [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/ejurnal%20Adi%20Abas%20\(02-12-18-05-30-19\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/ejurnal%20Adi%20Abas%20(02-12-18-05-30-19).pdf) (18/02/2019, 20:45 WIB)

mengatasi permasalahan ekonomi yang melanda Jepang melalui kebijakan yang ia keluarkan yang kemudian disebut sebagai *Abenomics*.¹⁶

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa kebijakan Abenomics ini merupakan sebuah jalan yang diharapkan Abe selaku Perdana Menteri, mampu mengatasi permasalahan krisis ekonomi Jepang yang telah dimulai sejak tahun 2008 akibat adanya krisis global. Di dalam Abenomics ini terdiri dari 3 (*tiga*) kebijakan¹⁷, yang kerap kali disebut dengan sebutan “panah”. Keterkaitan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yakni, dimana topik yang diangkat penulis mengenai tenaga kerja merupakan salah satu poin penting dalam kebijakan *Abenomics*.

Penelitian *kedua* yang dijadikan sebagai bahan tinjauan adalah **“Threat or Opportunity: Increasing of Muslim Worker in Japan Regarding Aging Population Issue”** oleh Eka Satria Putra, Gonda Yumitro dan M. Syaprin Zahidi.¹⁸ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Jepang diprediksi akan terus

¹⁶ *Abenomics* berasal dari kata Abe dan economics. *Abenomics* ini adalah kebijakan ekonomi sebagai sebuah respon untuk mengatasi masalah ekonomi di Jepang, pada masa pemerintahan Shinzo Abe. Selain untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi yang dialami oleh Jepang, rupanya kebijakan Abenomics ini juga ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi internasional antara lain meningkatkan permintaan domestik, mendorong peningkatan pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP), meningkatkan inflasi, meningkatkan prospek negara melalui daya saing, mereformasi pasar tenaga kerja, lalu yang terakhir adalah untuk memperluas kemitraan perdagangan.

¹⁷ Panah atau kebijakan *pertama* adalah kebijakan moneter yang ekspansioner dan kontraksioner dimana bertujuan untuk meningkatkan inflasi hingga 2% dengan cara meningkatkan peredaran jumlah uang dan pengurangan tingkat suku bunga. Tujuan dari kebijakan tersebut yakni diharapkan bahwa dapat melemahkan yen dan menaikkan tingkat harga dalam negeri. *Kedua* yaitu kebijakan stimulus fiskal, meningkatkan pengeluaran pemerintah dan/atau menurunkan penerimaan pajak. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan kembali pertumbuhan ekonomi dengan cepat dengan cara mendorong tingkat konsumsi dan investasi pada sektor publik pemerintah. *Ketiga* adalah kebijakan reformasi struktural antara lain melakukan reformasi dalam bidang agriculture, reformasi energi, reformasi pajak, reformasi pekerja dan womanomics, Cool Japan, dan lain sebagainya.

¹⁸ Eka Satria Putra, Gonda Yumitro dan M. Syaprin Zahidi, *Threat or Opportunity: Increasing of Muslim Worker in Japan Regarding Aging population Issue*, Public Policy and Administration Research, Vo, 8, No, 2 (2018), Malang: Department of International Relations, University of

mengalami penurunan jumlah penduduk usia dibawah 26 tahun, yang mana penurunan jumlah tersebut diduga akan berpengaruh pada efektifitas perusahaan lokal Jepang. Pada penelitian tersebut juga disebutkan bahwa mahalnnya biaya hidup di Jepang termasuk biaya untuk memiliki dan mengurus anak menjadi sebuah dorongan untuk masyarakatnya lebih aktif dalam mencari uang, dimana hal tersebut membuat masyarakat Jepang beranggapan bahwa tidak ada waktu untuk beristirahat dan bahkan menikah maupun memiliki momongan.

Terdapat banyak hal-hal positif yang melekat pada negara maupun masyarakat Jepang yang menjadikan hal tersebut sebagai identitas dan karakter yang kuat antara lain budaya kesopanan, kebersihan, kedisiplinan, kerja keras dan tingkat kejahatan yang rendah menjadikan Jepang memilih untuk begitu berhati-hati dalam membuka pintu masuk bagi imigran asing, salah satunya imigran muslim. Masuknya imigran muslim di Jepang¹⁹ mendorong meningkatnya jumlah pekerja muslim, serta menciptakan ancaman maupun peluang baik bagi umat muslim maupun bagi Jepang sendiri.²⁰

Muhammadiyah Malang, hal. 27-28, diakses melalui <https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/view/41254> (03/05/2019, 11:24 WIB)

¹⁹ Disebutkan bahwa Islam telah memasuki Jepang pada era Meiji, dimana pada era tersebut Jepang sendiri sudah mulai untuk membuka negaranya. Disisi lain adanya ketertarikan dari para pedagang seperti Arab, Turki dan India muslim untuk tinggal dan menetap di Jepang sejak tahun 1865. Sejak masuknya muslim, tercatat salah satu orang Jepang yang menjadi pemeluk Islam pertama adalah Abdul Halim Shotaro Noda (1868-1904) lalu diikuti oleh Torajiro Yamada yang ikut bergabung menjadi muslim setelah bertemu dengan Noda di Istanbul, 4 April 1892, dalam *Ibid*, hal. 28.

²⁰ *Ancaman* yang muncul antara lain dilatarbelakangi oleh perspektif yang menyatakan umat muslim sebagai pendukung terorisme, umat muslim sebagai golongan orang-orang yang fanatic, kebangkitan muslim di Jepang dinilai telah menggeser nilai dan kebudayaan lokal Jepang, serta citra yang buruk dihadapan masyarakat Jepang. Sedangkan *peluang* yang kemungkinan muncul ialah berkembangnya bisnis makanan halal, pekerja muslim menjadi sebuah solusi untuk menutupi kekurangan kebutuhan tenaga kerja, dan pekerja muslim dapat menjadi solusi bagi fenomena *aging population* yang dihadapi oleh Jepang, dalam Eka Satria Putra, dkk, *Ibid*, hal. 29-30.

Dari penelitian tersebut menegaskan bahwa masuknya imigran muslim ke Jepang dapat menjadi salah satu solusi bagi fenomena *aging population* di Jepang, dengan memasukkan kebudayaan dan nilai baru bagi Jepang melalui pernikahan campuran. Selain itu, masuknya imigran muslim mampu memberikan keuntungan politik bagi Jepang dimana imigran muslim ini dapat dijadikan sebagai cadangan tenaga kerja. Meskipun kemunculan dan semakin berkembangnya jumlah umat muslim maupun pekerja muslim di Jepang menciptakan ancaman, namun tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut memberikan efek positif tersendiri. Terdapat poin yang sama antara penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni krisis tenaga kerja Jepang dapat teratasi melalui masuknya imigran atau tenaga kerja asing.

Penelitian *ketiga* adalah **“Pengiriman Tenaga Perawat dan Careworker Indonesia ke Jepang dalam Kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)”** oleh Shobichatul Aminah, Stedi Wardoyo dan Sri Pangastoeti.²¹ Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa *aging population* atau masyarakat yang menua (*koreika shakai*) di Jepang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Jepang,²² selain karena adanya krisis ekonomi yang melanda di era tahun 1980an hingga awal 1990an.²³

²¹ Shobichatul Aminah, Stedi Wardoyo dan Sri Pangastoeti, *Pengiriman Tenaga Perawat dan Careworker Indonesia ke Jepang dalam Kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)*, Bakti Budaya, Vol, 1, No. 1 (April 2018), diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/bakti/article/view/37933/21832> (03/05/2019, 20:35 WIB)

²² Disebabkan oleh angka kelahiran yang rendah dan angka harapan hidup yang panjang. Mulai dialami oleh Jepang pada tahun 1960-1970an ketika perekonomian Jepang mengalami pertumbuhan yang tinggi (*Keizai koudou seichou*), dalam *Ibid*.

²³ Pesatnya perekonomian Jepang di tahun 1980an membawa Jepang pada naiknya harga saham dan juga harga tanah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat Jepang. fenomena krisis tersebut kemudian disebut dengan ekonomi gelembung (*bubble economy*), yang mana pada waktu itu harga aset mengalami kelonjakan yang drastis. Di tahun 1992, akibat keadaan tersebut banyak perusahaan di Jepang mengalami kerugian dan memecat banyak karyawannya hingga tingkat pengangguran di Jepang meningkat. *Bubble economy* tersebut terjadi

Pada penelitian keempat pula ini dijelaskan bahwa naiknya jumlah penduduk usia lanjut membuat pemerintah mendapat beban tambahan yakni harus menanggung biaya lebih akibat semakin berkurangnya tenaga kerja yang produktif. Selain itu, meningkatnya penduduk usia tua juga mendorong naiknya kebutuhan pemerintah Jepang akan tenaga kerja terutama tenaga kerja dibidang kesehatan, tenaga perawat maupun *careworker*.²⁴ Hal tersebut yang kemudian mendorong Jepang untuk gencar membuka kesempatan bagi tenaga-tenaga perawat dan *careworker*, khususnya Indonesia melalui EPA untuk masuk ke Jepang. Serupa dengan apa yang diangkat penulis pada penelitian ini, dimana *aging population* di Jepang menjadi salah satu faktor mengapa Jepang menerima atau membuka peluang bagi tenaga perawat baik rumah sakit maupun panti jompo dari negara lain khususnya melalui EPA.

Penelitian *keempat* **“Peran Jepang Meningkatkan Kerjasama Perdagangan dengan Indonesia dalam Kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Tahun 2010-2011”**, oleh Hika Dayama.²⁵ Sebagai sebuah negara, Indonesia menginginkan untuk dapat semakin memajukan perekonomiannya dimana hal tersebut salah satunya didukung dengan cara

kisaran tahun 1986 hingga awal tahun 1993, dalam Viema Mirzalita, *Pengaruh Perubahan Sistem Manajemen Perusahaan Jepang Paska Meletusnya Ekonomi Gelembung Terhadap Meningkatnya Jumlah Freeter*, 2015, Universitas Gadjah Mada, diakses melalui <http://etd.repository.ugm.ac.id/> (14/06/2019, 22:13 WIB)

²⁴ Selain karena jumlah yang tidak seimbang antara tenaga perawat, *careworker* dan lansia, kekurangan tenaga perawat dan *careworker* disebabkan oleh semakin menurunnya minat masyarakat Jepang untuk menjadi perawat karena alasan rendahnya upah sebagai perawat dibandingkan dengan pekerjaan lain. Selain itu juga semakin banyaknya tenaga perawat di Jepang yang memilih untuk berhenti bekerja, dalam Shobichatul, *Loc.Cit*.

²⁵ Hika Dayama, 2017, *Peran Jepang Meningkatkan Kerjasama Perdagangan dengan Indonesia dalam Kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Tahun 2010-2011*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41066/1/HIKA%20DAYAMA-FISIP.pdf> (09/07/2019, 16:44 WIB)

melakukan kerjasama dengan negara-negara lain agar produk-produk Indonesia semakin mampu untuk bersaing dalam perdagangan di pasar dunia. Salah satu kerjasama yang mendukung keinginan Indonesia tersebut adalah Jepang melalui kerangka kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Melalui kerangka kerjasama tersebut memungkinkan bagi Indonesia untuk menggenjot volume perdagangan yang diaplikasikan melalui tiga pilar utama²⁶.

Sebelum lahirnya kerangka kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), tercatat pada tahun 1970-an Indonesia telah menjadi pemasok migas terbesar Jepang. Saat ini, dengan adanya *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), Jepang menjadikan Indonesia sebagai mitra dalam hal perdagangan karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang potensial dapat dijadikan sebagai tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan domestik Jepang. Dimana dalam hal ketenagakerjaan Jepang sendiri telah membuka peluang yang lebar bagi Indonesia, yang mana Jepang memiliki komitmen untuk menerima investasi Indonesia di bidang jasa, memberikan kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk masuk dan bekerja di Jepang tanpa adanya pembatasan, yang nantinya mereka pun akan diperlakukan sama oleh penyedia jasa Jepang.

²⁶ Pilar pertama adalah Liberalisasi, yang mana memungkinkan untuk menghapus atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan investasi yang memungkinkan mempermudah masuknya barang-barang Indonesia masuk ke Jepang. Pilar kedua adalah *facilitation* yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mengadakan penanganan di pelabuhan perihal jasa perdagangan. Di sisi lain *facilitation* ini juga berfungsi untuk mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan kinerja bea cukai. Sementara yang ketiga adalah *cooperation* yang mana dalam hal ini pihak Jepang dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan daya saing dengan cara mengadakan pengembangan *capacity building* di dalam dunia industri Indonesia yang disebut dengan *Manufacturing Industrial Development Center* (MINDEC), dalam *Ibid*, hal. 5-6.

Penelitian *kelima* yakni **“Kerjasama Internasional Jepang dengan Indonesia dan Filipina Dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja di Jepang”** oleh Tia Ayu Sulistyana.²⁷ Dalam jurnal yang keenam ini disebutkan apabila fenomena perubahan demografi Jepang memiliki kaitan yang cukup erat dengan perilaku dan juga nilai-nilai masyarakat Jepang. Dewasa ini masyarakat Jepang sendiri baik pria maupun wanita cenderung enggan atau menunda untuk berkeluarga dan memilih untuk melanjutkan karir dan pekerjaannya. Perubahan demografi tersebut yang kemudian muncul sebagai faktor yang menyebabkan adanya krisis tenaga kerja di Jepang.

Terdesaknya Jepang yang mengalami krisis tenaga kerja tersebut kemudian membuat Jepang melakukan kerjasama internasional²⁸ untuk menerima tenaga kerja asing yang diharapkan mampu menutup kebutuhan akan tenaga kerja. Kerjasama yang terjalin antara Jepang dengan Indonesia dan Filipina baik melalui TITP maupun EPA bertujuan untuk mempermudah Jepang dengan kedua negara tersebut melakukan transfer teknologi, perdagangan dan juga investasi. Kerjasama tersebut juga termasuk pada penerimaan tenaga kerja dari Indonesia maupun Filipina masuk ke Jepang khususnya tenaga perawat atau kesehatan setiap tahunnya.

²⁷ Tia Ayu Sulistyana, 2019, *Kerjasama Internasional Jepang dengan Indonesia dan Filipina Dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja di Jepang*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses melalui <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25932> (13/06/2019, 21:48 WIB)

²⁸ Bentuk kerjasama internasional Jepang yang pertama adalah *Technical Intern Training Program* (TITP) dengan tujuan untuk memudahkan Jepang memenuhi kebutuhan tenaga kerja muda dari berbagai negara berkembang, yang disusul oleh pembentukan *The Japan International Training Cooperation Organization* (JITCO) guna meluncurkan jalannya TITP tersebut. Kerjasama internasional Jepang yang kedua yakni *Economic Partnership Agreement* (EPA), perjanjian dua negara atau lebih, menyediakan partisipasi dan integritas ekonomi dengan timbal balik yang asimetris, dalam Tia Ayu Sulistyana, *Ibid*, hal. 46-59.

Pembahasan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian kali ini tidak jauh berbeda dengan penelitian tersebut di atas, dimana keduanya sama membahas mengenai kerjasama bilateral pengiriman dan penerimaan tenaga kerja khususnya tenaga kesehatan atau perawat yang berkompeten ke Jepang. Hal tersebut tidak lain untuk memenuhi kebutuhan Jepang akan tenaga perawat, seiring terus meningkatnya jumlah manula.

Penelitian *keenam* **“Kebijakan Jepang Terhadap Imigran: Analisis Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Ke- 2”**, oleh Niki Wahyu Sayekti.²⁹ Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai semakin menurunnya populasi akibat semakin rendahnya angka kelahiran di Jepang yang kemudian berdampak pada sektor perekonomiannya. Dampak yang dialami tersebut yakni kelangkaan tenaga kerja di beberapa sektor lapangan pekerjaan. Akibatnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Jepang kemudian berinisiatif untuk mendatangkan tenaga kerja asing.

Dalam tulisan ini digambarkan mengenai keraguan pemerintah Jepang ketika menghadapi permasalahan krisis tenaga kerja dan ketika dihadapkan pada pilihan untuk menerima tenaga kerja asing. Dimana salah satu faktor yang menjadi keraguan bagi pemerintah Jepang adalah dari segi kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Jepang.

Pembahasan yang terdapat dalam jurnal tersebut memiliki persamaan dengan tulisan penulis, dimana keduanya sama-sama membahas mengenai krisis

²⁹ Niki Wahyu Sayekti, *Kebijakan Jepang Terhadap Imigran: Analisis Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Ke- 2*, Kebijakan Jepang Terhadap Tenaga Kerja Imigran, diakses melalui <http://docplayer.info/46448057-Kebijakan-jepang-terhadap-imigran-analisis-pada-masa-pemerintahan-shinzo-abe-periode-ke-2.html> (07/07/2019, 00:12 WIB)

tenaga kerja sebagai dampak dari permasalahan populasi atau demografi. Selain itu keduanya juga membahas mengenai kebijakan yang diupayakan pemerintah Jepang dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No.	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1	Analisis Implementasi Kebijakan Abenomics di Jepang Tahun 2012-2017 Oleh: Adi Abas	Deskriptif-Analitik Kualitatif Landasan Konsep : 1. Konsep Implementasi Kebijakan 2. Konsep Kebijakan Makroekonomi 3. Teori Sistem Politik	Upaya Shinzo Abe untuk memecahkan permasalahan ekonomi melalui kebijakan <i>Abenomics</i> .
2	Threat or Opportunity: Increasing of Muslim Worker in Japan Regarding Aging Population Issue Oleh: Eka Satria Putra, Gonda Yumitro dan M. Syaprin Zahidi	Kualitatif	Imigran muslim menjadi salah satu solusi dari permasalahan krisis tenaga kerja di Jepang, memiliki tantangan sekaligus peluang baik bagi Jepang maupun muslim sendiri.
3	Pengiriman Tenaga Perawat dan <i>Careworker</i> Indonesia ke Jepang dalam Kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) Oleh: Shobichatul Aminah, Stedi Wardoyo dan Sri Pangastoeti	Kualitatif	Meningkatnya kebutuhantenaga perawat atau <i>careworker</i> di Jepang sejalan dengan semakin tingginya jumlah penduduk usia lanjut.
4	Peran Jepang Meningkatkan Kerjasama	Deskriptif-Kualitatif Deskriptif-Analitis	Jepang menjadi salah satu negara

	Perdagangan dengan Indonesia dalam Kerangka <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i> (IJEPA) Tahun 2010-2011 Oleh: Hika Dayama	Landasan Konsep: 1. Teori Liberalisme 2. Konsep Kerjasama Internasional 3. Konsep Kepentingan Nasional	yang mendorong Indonesia dalam meningkatkan ekonomi perdagangan melalui kerjasama. Kerjasama keduanya merupakan kerjasama yang dinilai seimbang dan menguntungkan satu sama lain.
5	Kerjasama Internasional Jepang dengan Indonesia dan Filipina Dalam Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja di Jepang Oleh: Tia Ayu Sulistyana	Deskriptif-Eksplanatif Kualitatif Landasan Konsep : 1. Konsep Kerjasama Internasional	Krisis usia produktif sebagai faktor terjadinya krisis tenaga kerja mendorong Jepang melakukan kerjasama internasional guna menutupi kebutuhan akan pasokan tenaga kerja usia muda.
6	Kebijakan Jepang Terhadap Imigran: Analisis Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Periode Ke-2 Oleh: Niki Wahyu Sayekti	Deskriptif Kualitatif Landasan Konsep: 1. Analisis Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik 2. Teori Identitas Kolektif 3. Konsep Pemikiran Masyarakat Jepang	Permasalahan demografi sebagai faktor pemicu timbulnya permasalahan ekonomi di Jepang, hingga menyebabkan terjadinya krisis tenaga kerja.
7	Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Menangani Krisis Tenaga Kesehatan Melalui Kerjasama Dengan Indonesia dan Filipina	Deksriptif Kualitatif Landasan Konsep: 1. Kebijakan Luar Negeri 2. Kemitraan	<i>Aging population</i> sebagai dasar pembuatan kebijakan kerjasama pengiriman tenaga

	Oleh : Angela Certa Anisya	Ekonomi	kesehatan dan perawat oleh pemerintah Jepang melalui EPA dengan Indonesia dalam <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i> (IJEPA) dan dengan Filipina melalui <i>Philippines-Japan Economic Partnership Agreement</i> (PJEPA).
--	----------------------------	---------	--

1.5 Landasan Konsep

1.5.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah usaha yang dilakukan negara guna mencapai cita-citanya, memenuhi kebutuhannya (kebutuhan atau kepentingan nasional) melalui sebuah kebijakan yang ditujukan atau berhubungan dengan negara lain. Adanya kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah sebuah negara adalah dapat mencapai kepentingan nasionalnya, sekalipun pada kenyataannya dianggap tidaknya sebuah kepentingan tersebut sebagai kepentingan nasional tetap tergantung pada sudut pandang penguasanya.³⁰

Mengenai kebijakan luar negeri, Rossenau berpendapat bahwa kebijakan luar negeri adalah sebuah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap juga aktivitasnya untuk mengatasi sekaligus memperoleh keuntungan dari lingkungan

³⁰ Mochtar Mas'oed, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, hal. 184, dalam Yanyan Mochamad Yani, *Politik Luar Negeri*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, hal. 3, diakses melalui http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf (08/07/2019, 00:58 WIB)

eksternalnya.³¹ Sedangkan kebijakan luar negeri menurut Mark R. Amstutz ialah tindakan eksplisit dan implisit pejabat pemerintahan yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan nasional di luar batas wilayah suatu negara (*explicit and implicit actions of governmental official designed to promote national interest beyond a country's territorial boundaries*).³²

Pada dasarnya, kebijakan luar negeri dijalankan oleh pemerintah suatu negara guna melancarkan jalan mereka untuk mencapai keinginan atau cita-cita serta kepentingan nasional mereka dengan cara mempengaruhi negara lain. Menurut Joshua Goldstein, kebijakan luar negeri yaitu berbagai strategi yang diambil pemerintah guna menentukan aksi mereka di dalam dunia internasional.³³ Membahas mengenai kebijakan luar negeri, K.J. Holsti mengungkapkan setidaknya terdapat tiga kriteria utama dalam mencanangkan kebijakan luar negeri, dimana yang pertama adalah nilai yang termasuk didalamnya meliputi faktor pendorong pembuat kebijakan. Kriteria yang kedua yakni jangka waktu guna mencapai tujuan, dibagi menjadi jangka menengah dan jangka Panjang. Kemudian yang terakhir ialah jenis tuntutan tujuan yang mana hal tersebut

³¹ Anak Agung Banyu Parwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 49

³² Howard H. Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach* (Columbus, Ohio: Charles E. Merrill, 1974), dalam Yanuar Ikbar, 2014, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 207

³³ Joshua Goldstein, *International Relations*, (New York: Longman, 1999), hal. 147, dalam Auditya Rachmaniyah, Khairi Fuady, dkk, 2014, *Kebijakan Luar Negeri*, Makalah, Jakarta: Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, hal. 3, diakses melalui https://www.academia.edu/9749867/Definisi_Tujuan_dan_Model_Kebijakan_Luar_Negeri (13/06/2019, 00:25 WIB)

dibebankan kepada negara lain oleh negara yang memiliki tujuan tertentu tersebut.³⁴

Memahami mengenai kehidupan bernegara yang mana negara satu dengan negara lainnya sudah pasti berhubungan, baik melalui kerjasama maupun perang. Setiap negara memiliki perbedaan dalam hal kepentingan nasionalnya, dimana kepentingan nasional tersebut yang kemudian menjadi faktor sebuah negara untuk melakukan atau mewujudkan sebuah kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri suatu negara haruslah memprioritaskan kepentingan-kepentingan negara tersebut.

Kebijakan luar negeri dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bidang, yakni kebijakan luar negeri dalam bidang ekonomi, kebijakan luar negeri dalam bidang sosial, termasuk kebijakan luar negeri dalam bidang kebudayaan. Kebijakan luar negeri dalam bidang ekonomi merupakan sebuah langkah yang ditempuh oleh suatu negara untuk membuka pintu dan melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam kebijakan ini memungkinkan untuk terjadinya ekspor bagi produk-produk dalam negeri dan membuka jalan bagi masuknya barang modal dan bahan baku guna kelangsungan produksi dari negara lain.³⁵ Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri dalam hal ekonomi ini antara lain dapat dilakukan melalui adanya kebijakan promosi ekspor, kebijakan substitusi ekspor, dan kebijakan proteksi industri.³⁶

³⁴ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1983), hal. 107, dalam *Ibid*.

³⁵ Maria Magdalena Minarsih, *Kebijakan Ekonomi Indonesia dan Internasional serta Tantangannya di Era Globalisasi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Pandanaran, hal. 11, diakses melalui <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/download/20/17> (18/08/2019, 09:25 WIB)

³⁶ Kebijakan promosi ekspor merupakan sebuah kegiatan eksportir untuk mengkomunikasikan suatu produk kepada pembeli di luar negeri yang tertarik kepada produk yang ditawarkan pihak produsen tersebut, dalam Wahyu Priyanto, 2005, *Strategi Promosi Ekspor Melalui Pemanfaatan*

Kebijakan luar negeri dalam bidang lainnya adalah kebijakan luar negeri dalam bidang sosial. Kebijakan luar negeri dalam bidang ini merupakan salah satu kebijakan yang dapat dikatakan penting dimana dengan adanya kebijakan sosial luar negeri atau global ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di dunia internasional.³⁷ Sementara itu, tidak kalah pentingnya adalah kebijakan luar negeri dalam bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan sendiri, sebuah negara dapat mengimplementasikannya melalui diplomasi³⁸ kebudayaan. Diplomasi kebudayaan ini bermaksud untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman bagi masyarakat internasional mengenai budaya di suatu negara. Sebagai contoh salah satunya adalah diplomasi kebudayaan Vietnam, diplomasi kebudayaan merupakan salah satu dari tiga pilar diplomasi Vietnam yakni diplomasi politik serta diplomasi ekonomi. Kebijakan diplomasi yang diselenggarakan oleh Vietnam ini bertujuan untuk agar dunia dapat lebih memahami baik negara, masyarakat serta budaya Vietnam, selain itu tujuan lainnya adalah untuk memperkuat kepercayaan negara-negara lain terhadap

Teknologi Informasi, Tugas Akhir, Surakarta: Program D-3 Bisnis Internasional, Universitas Sebelas Maret, hal. 43, diakses melalui <https://eprints.uns.ac.id/9518/1/68072206200909421.pdf> (18/08/2019, 09:40 WIB). Sedangkan kebijakan substitusi ekspor adalah kebijakan promosi ekspor merupakan sebuah kegiatan eksportir untuk mengkomunikasikan suatu produk kepada pembeli di luar negeri yang tertarik kepada produk yang ditawarkan pihak produsen tersebut. Disisi lain kebijakan berikutnya yang terkait dengan kebijakan luar negeri dalam bidang ekonomi ialah kebijakan proteksi industri, dimana kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang diperuntukkan untuk melindungi produsen-produsen dalam negeri hingga mereka dirasa mampu untuk bersaing dengan produsen asing. Guna melindungi produsen-produsen tersebut biasanya ditetapkan peraturan dimana dilarang maupun dibatasinya barang-barang serupa dari luar negeri dengan batasan kuota, dalam Maria Magdalena Minarsih, *Op.Cit*, hal. 12

³⁷ *Mengkaji Isu Pekerjaan Sosial dalam Konteks Internasional bersama Pakar dari University of Sydney*, diakses melalui <http://fisip.ui.ac.id/mengkaji-isu-pekerjaan-sosial-dalam-konteks-internasional-bersama-pakar-dari-university-of-sydney/> (18/08/2019, 09:56 WIB)

³⁸ Diplomasi diartikan sebagai urusan atau penyelenggaraan perhubungan antara suatu negara dengan negara lain, dapat juga diartikan dengan urusan kepentingan sebuah negara dengan melalui perantaraan wakil-wakilnya di negara lain, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Kamus Versi Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/diplomasi> (18/08/2019, 10:11 WIB)

Vietnam dan juga lebih merekatkan hubungan antara Vietnam dan negara-negara mitra, menjadikan hubungan mereka stabil dan memperkuat posisi Vietnam di percaturan dunia internasional.³⁹

Berdasarkan dari penjabaran pengertian kebijakan luar negeri menurut para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah usaha pemerintah suatu negara untuk menanggulangi permasalahan di dalam negaranya atau untuk mencapai tujuannya. Usaha tersebut kemudian ia implementasikan melalui kebijakan yang mempengaruhi negara-negara atau aktor lain di luar negaranya. Menyangkut kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Jepang nampaknya penggunaan konsep ini dapat membantu penulis untuk menjabarkan kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan Jepang yang mengarah ke luar daerah teritorialnya atau ke luar negeri. Dalam permasalahan yang dihadapi Jepang, selain mengupayakan sebaik mungkin untuk menyelesaikan permasalahan melalui kebijakan ke dalam, namun nampaknya Jepang juga berinisiatif untuk mendorong upaya tersebut melalui kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri yang dilancarkan oleh Jepang ini termasuk dalam kebijakan luar negeri dalam bidang ekonomi, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah melakukan kerjasama dalam bidang kesehatan dengan beberapa negara salah satunya adalah Indonesia melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan Filipina melalui *Philippines-Japan Economic Partnership Agreement* (PJEPA) dalam kerangka besar

³⁹ Van Kim Hoang Ha, *Peran Diplomasi Budaya Dalam Mewujudkan Komunitas Sosial-Budaya Asean: Kasus Vietnam*, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. X, No. 1 (September 2016), Ho Chi Minh City: University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, diakses melalui <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/view/1069/990> (18/08/2019, 10:05 WIB)

Economic Partnership Agreement (EPA), membuka pintu bagi tenaga kerja asing hingga upayanya untuk melahirkan sebuah undang-undang baru mengenai tenaga kerja asing, yang mana kebijakan tersebut dapat digolongkan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Jepang dan relevan dengan konsep kebijakan luar negeri ini.

1.5.2 Kemitraan Ekonomi

Kemitraan memiliki kemiripan arti dengan *partnership*, dimana dapat diartikan sebagai pasangan maupun sekutu.⁴⁰ Berdasarkan pengertian tersebut maka bisa dikatakan bahwa kemitraan ini merupakan sebuah bentuk kerjasama atau persekutuan yang terjalin antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerangka kerjasama berdasarkan kesepakatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemitraan merupakan perihal hubungan jalinan kerjasama sebagai mitra.⁴¹ Dalam buku Kemitraan Usaha dijelaskan bahwa kemitraan ialah suatu strategi bisnis yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih pada jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan.⁴²

Kemitraan dilakukan ketika kedua belah pihak atau lebih memiliki tujuan yang sama dan saling memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Dalam ekonomi, kemitraan bertumpu pada adanya kontribusi bersama baik tenaga maupun benda atau bahkan keduanya guna mencapai tujuan ekonomi.⁴³

⁴⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, hal. 129. diakses melalui <https://digilib.unila.ac.id/10920/6/BAB%20II.pdf> (27/09/2019, 20:37 WIB)

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Kamus Versi Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/mitra> (27/09/2019, 20:49 WIB)

⁴² Muhammad Jafar Hafsa, 1999, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 43.

⁴³ Burns, 1996, dalam Badan Agribisnis Departemen Pertanian, 1998, dalam Mia Nur Damayanti, 2009, *kajian Pelaksanaan Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Antara Petani Semangka di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dengan CV. Bimandiri*, Bogor, IPB Press, hal. 18

Berdasarkan dengan lingkupnya yakni ekonomi maka kemitraan yang terjalin oleh dua pihak atau lebih tersebut mengandung tujuan untuk mencari keuntungan atau laba dari kemitraan yang mengikat mereka.⁴⁴ Menurut Keint L. Fletcher kemitraan dilakukan oleh pihak-pihak yang bertujuan memperoleh keuntungan, dimana pendapat tersebut berbeda dengan Ian Linton dan Muhammad Jafar Hafsa yang mana keduanya melihat kemitraan merupakan sebuah strategi bisnis.⁴⁵ Terlepas dari kemitraan sebagai jalan untuk memperoleh keuntungan atau hanya sekedar strategi bisnis, kemitraan sendiri ternyata juga memiliki tujuan. Tujuan dari kemitraan tersebut antara lain adalah untuk mendorong peningkatan wawasan dari pihak mitra usaha tersebut.⁴⁶

Dari penjelasan mengenai kemitraan dapat ditarik kesimpulan bahwa kemitraan merupakan sebuah jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai kepentingan yang telah disepakati bersama. Konsep kemitraan yang telah dijabarkan tersebut, penulis memfokuskan pada kemitraan ekonomi atau *economic partnership* yang pada tulisan ini penulis mengangkat studi kasus *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang digambarkan pada kemitraan Jepang dan Indonesia dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) serta Jepang dan Filipina dalam *Philippines-Japan Economic Partnership Agreement* (PJEPA). Melalui kemitraan yang terjalin diantara kedua belah pihak tersebut, kesemua pihak sama-sama mendapatkan keuntungannya. EPA sendiri merupakan sebuah instrument kerjasama bilateral yang didirikan oleh

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Tinjauan Pustaka, *Konsep Kemitraan*, diakses melalui <https://digilib.unila.ac.id/10920/6/BAB%20II.pdf> (27/09/2019, 20:37 WIB)

⁴⁶ *Ibid.*

Jepang sekitar tahun 2000an. Sebuah konsep kerjasama dalam hal ekonomi, yakni ekonomi global dimana konsep kerjasama ini merupakan sebuah konsep kerjasama yang dilakukan negara-negara untuk menghadapi pusaran ekonomi global.⁴⁷

Dalam kemitraan yang dilangsungkan Jepang dengan Indonesia, pihak Jepang mendapatkan pasokan tenaga kerja produktif khususnya dalam bidang kesehatan. Sementara disisi lain pihak mitra baik Indonesia pun mendapatkan keuntungan salah satunya dengan adanya akses yang diberikan oleh Jepang terhadap tenaga kerja mereka. Dengan adanya kemitraan tersebut keuntungan yang ada bagi negara-negara mitra antara lain seperti adanya penghapusan tarif ekspor impor serta pengembangan lingkungan investasi.⁴⁸

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode/Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menulis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini sendiri merupakan metode penelitian yang kerap kali digunakan dalam penelitian-penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan “bagaimana”. Penelitian deskriptif

⁴⁷ Objek Penelitian, Bab III, *Economic Partnership Agreement*, hal. 57, diakses melalui https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://elib.unikom.ac.id/download.php%3Fid%3D57867&ved=2ahUKEwi61ouDj_jiAhXJV30KHZZnBhgQFjABegQIARAB&usg=AQvVaw2nDD2iyxq3YIbMXXCt-yVV (06/07/2019, 23:50 WIB)

⁴⁸ Ministry of Economy, Trade and Industry Japan, “*EPA Economic Partnership Agreement*”, (dokumen online), diakses melalui http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/english.html, dalam Hika Dayama, 2017, *Peran Jepang Meningkatkan Kerjasama Perdagangan Dengan Indonesia Dalam Kerangka Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Tahun 2010-2011*, Skripsi, Jakarta: Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah, hal. 49, diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/410066/1/HIKA%2520DAYAMA-FISIP.pdf> (10/07/2019, 09:52 WIB)

ini adalah penelitian yang akan menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi permasalahan krisis tenaga kesehatan yang dihadapi akibat adanya *aging population*.

1.6.2 Teknik Analisa Data

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik Analisa data kualitatif. Di dalam teknik analisa data kualitatif, data-data yang digunakan merupakan data yang tidak berbentuk angka, atau data-data yang tidak terukur (non-numerik).

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3.1 Batasan Waktu

Dalam penelitian yang dibahas kali ini, batasan waktu yang ditentukan oleh penulis yakni tahun 2012 sampai tahun 2019, dimana tahun 2012 merupakan tahun dimana Shinzo Abe kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang setelah sebelumnya mengundurkan diri di tahun 2007, pada periode pertamanya. Sementara tahun 2019 sendiri merupakan tahun dimana Rancangan Undang-Undang baru diberlakukan oleh Pemerintah Jepang terkait ketenagakerjaan.

1.6.3.2 Batasan Materi

Pada penelitian ini, batasan materi yang ditentukan oleh penulis adalah berfokus pada permasalahan krisis tenaga kesehatan akibat fenomena *aging population* di Jepang serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang guna menangani permasalahan krisis tenaga kesehatan tersebut. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama *Economic Partnership Agreement* (EPA) dengan Indonesia dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan

dengan Filipina dalam *Philippines-Japan Economic Partnership Agreement* (PJEPA)

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui studi pustaka yakni mencari data dari sumber-sumber yang relevan seperti buku dan *e-book*, jurnal maupun *e-journal*, surat kabar, internet, tesis, jurnal skripsi dan juga *working paper*.

1.7 Argumen Pokok

Dalam menghadapi krisis tenaga kerja yang tengah dialami, pemerintah Jepang telah melakukan berbagai upaya. Dimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang tersebut antara lain adalah dengan mengadakan kerjasama. Kerjasama yang dijalin Jepang dikerangkai melalui kerangka kerjasama *Economic Partnership Agreement* (EPA) salah satunya dengan Indonesia dan Filipina. Melalui kerjasama tersebut Jepang menerima tenaga kerja perawat dan kesehatan, baik dari Indonesia maupun Filipina.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi tulisan ini menjadi lima bab. Kelima bab tersebut antara lain adalah :

Bab satu yang berisi mengenai pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan konseptual yang digunakan oleh penulis guna mengerangkai penelitian ini yakni Kebijakan Luar Negeri dan Kemitraan Ekonomi, serta argumen pokok.

Bab dua berisi pembahasan mengenai fenomena *aging population*, menjabarkan sekilas mengenai perubahan demografi penduduk Jepang serta menjabarkan mengenai adanya permasalahan krisis tenaga kerja terlebih di bidang kesehatan akibat fenomena *aging population* di Jepang.

Bab tiga membahas mengenai upaya yang dilakukan Jepang untuk mendorong masuknya tenaga kerja asing, antara lain dengan mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Tenaga Kerja Asing Baru, mendorong adanya kebijakan keimigrasian yang membantu mengatur mengenai tenaga kerja asing, serta adanya *The Japan Revitalization Strategy* sebagai langkah untuk mempermudah tenaga kerja asing di Jepang.

Bab empat berisi mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Jepang dengan Indonesia melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan Jepang dengan Filipina dalam *Philippines-Japan Economic Partnership Agreement* (PJEPA) terkait pengiriman tenaga kesehatan, membahas mengenai terbentuknya kerjasama tersebut, kebijakan pemerintah Jepang terhadap tenaga kerja asing, serta membahas mengenai ketentuan dalam pengiriman tenaga kerja dan implementasi pengiriman tenaga kesehatan dari kedua negeri mitra tersebut ke Jepang.

Bab lima berisi penutup, terdiri dari kesimpulan penulis terkait penelitian ini serta saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.